

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIM) UNTUK MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN DI TP PKK KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL KOTA BANDUNG

Anita Syafariah¹, Gunawasyah², Teguh Wiharko³, Yusup Abdul⁴, Abdul Alpariji⁵

Universitas Sangga Buana Bandung

Email: anita.syafariah@usbypkp.ac.id, gsyahbdg@gmail.com, Teguh.Wiharko@usbypkp.ac.id
yusupabdlazz@gmail.com, abdul.alpariji01@gmail.com

Abstrak

TP PKK Kecamatan Cibeunying Kidul merupakan organisasi kemasyarakatan yang berperan penting dalam pembangunan keluarga. Namun, berbagai permasalahan ditemukan terkait pengelolaan data dan mutu pelayanan administrasi, seperti jumlah kader yang terbatas, rendahnya kemampuan TIK, proses pencatatan manual, serta belum adanya sistem informasi yang terintegrasi. Penelitian ini bertujuan merancang Sistem Informasi Manajemen PKK (SIM-PKK) yang mampu meningkatkan efektivitas pendataan, penyusunan laporan, dan kualitas pelayanan. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIM-PKK mampu menyediakan data terintegrasi, mempercepat pembuatan laporan, meminimalkan kesalahan pencatatan, serta meningkatkan kemampuan digital kader PKK setelah dilakukan pelatihan TIK. Penelitian ini merekomendasikan implementasi berkelanjutan SIM-PKK, peningkatan literasi digital kader, serta dukungan pemerintah daerah untuk memaksimalkan manfaat teknologi informasi dalam pelayanan masyarakat.

Kata kunci: Sistem Informasi Manajemen, PKK, Digitalisasi, Mutu Pelayanan, Teknologi Informasi.

Abstract

TP PKK Kecamatan Cibeunying Kidul is a community-based organization that plays an important role in family development. However, several issues have been identified related to data management and the quality of administrative services, such as the limited number of cadres, low digital literacy, manual recording processes, and the absence of an integrated information system. This study aims to design a PKK Management Information System (SIM-PKK) that can enhance the effectiveness of data collection, report preparation, and service quality. The research employed a descriptive qualitative approach through observation, interviews, and document analysis. The findings indicate that SIM-PKK is able to provide integrated data, accelerate report generation, minimize recording errors, and improve the digital skills of PKK cadres following ICT training. The study recommends the continuous implementation of SIM-PKK, the improvement of cadre digital literacy, and support from local government to maximize the benefits of information technology in public service delivery.

Keywords: Management Information System, PKK, Digitalization, Service Quality, Information Technology.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

TP PKK Kecamatan Cibeunying Kidul memiliki peran strategis dalam peningkatan kesejahteraan keluarga. Namun, pelaksanaan tugas kader masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam manajemen data, pelaporan, dan administrasi. Berdasarkan data awal, jumlah kader aktif sangat terbatas bila dibandingkan jumlah penduduk. Dari 29.364 kepala keluarga dengan 93.644 jiwa, hanya terdapat 82 kader TP PKK, 1.609 kader umum, dan 685 kader

khusus. Artinya, hanya 0,253% masyarakat yang terlibat aktif dalam kegiatan PKK. Kondisi ini menimbulkan beban kerja yang berat bagi kader, terutama pada proses pendataan.

Selain itu, proses pencatatan dan pembuatan laporan dilakukan secara manual. Banyak format yang harus diisi, sehingga memerlukan waktu lama dan rawan kesalahan. Data juga tersebar di berbagai unit dan tidak terintegrasi, sehingga menyulitkan penyusunan laporan real-time. Ketidaksinkronan data antara dasawisma, kelurahan, dan kecamatan pun sering terjadi.

Belum adanya Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKK yang terintegrasi menyebabkan proses pelayanan menjadi lambat, kurang efektif, dan berpotensi menghasilkan informasi yang tidak akurat. Kondisi ini menuntut adanya inovasi berupa perancangan SIM-PKK yang mampu mempermudah pengolahan data, mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan mutu pelayanan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang dibutuhkan TP PKK Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung?
2. Bagaimana proses digitalisasi penginputan data dan pembuatan laporan dapat diterapkan di TP PKK Kecamatan Cibeunying Kidul?
3. Bagaimana pelatihan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat meningkatkan kompetensi kader dalam mengoperasikan SIM-PKK?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Umum

Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen (SIM-PKK) yang dapat meningkatkan mutu pelayanan administrasi PKK.

Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan kebutuhan dan merancang arsitektur SIM-PKK.
2. Mengimplementasikan digitalisasi pendataan dan pembuatan laporan.
3. Memberikan pelatihan TIK untuk meningkatkan kompetensi kader PKK.
4. Mengevaluasi peningkatan efektivitas kerja kader setelah penerapan SIM-PKK.

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoretis

1. Menambah kajian akademik tentang SIM dalam organisasi kemasyarakatan.
2. Menjadi model bagi pengembangan sistem digital pada organisasi berbasis kader.

B. Manfaat Praktis

1. Bagi TP PKK Kecamatan Cibeunying Kidul

1. Mempercepat penyusunan laporan.
2. Memperoleh data akurat dan real-time.
3. Meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi.

2. Bagi Kader PKK

1. Mempermudah pendataan.
2. Meningkatkan kemampuan TIK.
3. Mengurangi beban kerja manual.

3. Bagi Pemerintah Kecamatan

1. Menyediakan basis data yang lebih valid untuk pengambilan keputusan.
2. Mendukung kebijakan berbasis data.

2. KAJIAN TEORI

Sistem pada dasarnya merupakan seperangkat elemen yang saling berkaitan dan bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan tertentu. Elemen-elemen tersebut dapat berupa manusia, prosedur, perangkat teknologi, maupun data yang berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang berfungsi mendukung aktivitas organisasi. Dalam lingkup manajerial, sistem menjadi kerangka yang mengatur aliran informasi, proses operasional, serta mekanisme pengambilan keputusan

agar berjalan secara efektif dan efisien. Sebuah sistem umumnya memiliki karakteristik berupa komponen atau subsistem, batasan sistem, masukan dan keluaran, mekanisme kontrol serta umpan balik, dan berorientasi pada tujuan tertentu (Jogiyanto, 2017).

Informasi merupakan data yang telah melalui proses pengolahan sehingga memiliki makna dan nilai guna bagi penerimanya. Informasi yang berkualitas harus memenuhi indikator akurasi, ketepatan waktu, relevansi, dan kelengkapan karena informasi tersebut menjadi dasar bagi pengambil keputusan dalam menjalankan fungsi manajerial. Dalam konteks organisasi modern, informasi menjadi aset penting yang menentukan efektivitas dan kecepatan respons lembaga terhadap perubahan lingkungan (Laudon & Laudon, 2020).

Sistem informasi didefinisikan sebagai kombinasi antara manusia, perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, jaringan, dan basis data yang bekerja bersama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung aktivitas operasional dan manajerial organisasi. Komponen-komponen tersebut saling berinteraksi untuk menghasilkan informasi yang berguna, akurat, dan dapat diandalkan (O'Brien & Marakas, 2017). Salah satu bentuk sistem informasi yang memiliki peran strategis adalah Sistem Informasi Manajemen (SIM). SIM merupakan sistem yang dirancang khusus untuk menyediakan informasi bagi manajer dalam proses perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan pengawasan. SIM menghimpun data dari berbagai unit organisasi, kemudian mengolahnya menjadi laporan yang terstruktur, baik dalam bentuk laporan rutin maupun laporan ad hoc sesuai kebutuhan pimpinan (McLeod & Schell, 2012).

Mutu pelayanan merujuk pada tingkat kemampuan suatu organisasi dalam memenuhi atau melampaui harapan penggunanya. Kualitas tersebut tidak hanya terkait dengan hasil pelayanan, tetapi juga bagaimana proses pelayanan diberikan, termasuk aspek kecepatan, ketepatan, kemudahan akses, transparansi, dan responsivitas. Dalam pelayanan publik maupun sektor jasa, mutu pelayanan sangat dipengaruhi oleh konsistensi, keandalan, dan kemampuan organisasi memberikan layanan yang memuaskan bagi pengguna (Tjiptono & Chandra, 2016). Parasuraman et al. (1988) menjelaskan bahwa mutu pelayanan dapat dilihat dari lima dimensi SERVQUAL: bukti fisik (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (empathy), yang mencerminkan persepsi pengguna terhadap layanan yang diterima.

Hubungan antara SIM dan mutu pelayanan sangat erat, karena penerapan SIM yang baik dapat meningkatkan kualitas layanan secara signifikan. Integrasi sistem memungkinkan organisasi meminimalkan proses manual yang selama ini menyebabkan keterlambatan dan kesalahan pencatatan. SIM memberikan kemudahan akses bagi pengguna melalui layanan berbasis digital serta meningkatkan transparansi melalui penyajian informasi prosedur, biaya, dan status layanan secara terbuka. Selain itu, SIM menyediakan laporan kinerja secara real-time sehingga memudahkan pimpinan memantau pelaksanaan layanan dan mengambil keputusan berbasis data. Dengan demikian, SIM berperan sebagai pengungkit (enabler) dalam peningkatan kecepatan, ketepatan, keandalan, dan responsivitas pelayanan (Turban, Pollard & Wood, 2018).

Perancangan SIM dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari analisis kebutuhan untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan pengguna, perancangan proses dan basis data, pembangunan aplikasi, pengujian, sosialisasi, hingga pemeliharaan sistem. Model pengembangan seperti Waterfall, Prototyping, RAD, maupun Agile dapat digunakan sesuai karakteristik organisasi dan kompleksitas sistem. Jika SIM dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna, kemudahan penggunaan, dan kelengkapan fitur, maka implementasinya akan berdampak pada peningkatan mutu pelayanan, khususnya dalam hal kecepatan proses, akurasi data, transparansi, dan responsivitas terhadap keluhan atau kebutuhan pengguna (Pressman & Maxim, 2015).

Secara teoretis, organisasi yang masih mengandalkan proses manual cenderung menghadapi permasalahan berupa lambatnya pelayanan, tingginya risiko kesalahan, kurangnya

transparansi, serta sulitnya pemantauan kinerja. Oleh karena itu, diperlukan perancangan SIM yang mampu mengintegrasikan proses dan data, menyediakan antarmuka yang mudah digunakan, serta dilengkapi fitur pemantauan. Implementasi SIM yang tepat akan memperbaiki proses pelayanan, meningkatkan akurasi, memperluas keterjangkauan layanan, dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kinerja organisasi. Dampak akhirnya adalah peningkatan mutu pelayanan dalam dimensi waktu, keandalan, responsivitas, jaminan, maupun kepuasan pengguna (Zeithaml, Bitner & Gremler, 2018).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode **deskriptif kualitatif** dengan pendekatan studi kasus pada TP PKK Kecamatan Cibeunying Kidul.

3.1 Subjek dan Lokasi Penelitian

TP PKK Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi: Mengamati proses pendataan dan pelayanan secara langsung.
2. Wawancara: Dengan ketua PKK, kader, dan pengelola administrasi.
3. Studi Dokumentasi: Menganalisis data laporan PKK serta dokumen manual.

3.3 Teknik Analisis Data

Menggunakan model Miles & Huberman:

1. Reduksi data
2. Penyajian data
3. Penarikan kesimpulan

4. HASIL PENELITIAN

4.1 Perancangan Sistem Informasi Manajemen PKK

Perancangan Sistem Informasi Manajemen PKK (SIM-PKK) disusun berdasarkan analisis kebutuhan para pengguna, yaitu kader dasawisma, kader PKK RT/RW, kader kelurahan, dan kader kecamatan. Analisis ini dilakukan melalui wawancara, observasi proses manual, serta telaah dokumen pelaporan TP PKK yang selama ini digunakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa alur pendataan yang dilakukan secara manual oleh kader membutuhkan waktu lama, sering menimbulkan duplikasi data, dan menghasilkan laporan yang tidak seragam antarwilayah. Kondisi ini selaras dengan teori sistem yang menyatakan bahwa proses manual yang tidak terintegrasi rentan menghasilkan ketidakefisienan serta kesalahan input.

Berdasarkan temuan tersebut, SIM-PKK dirancang dengan beberapa fitur utama yang dapat mengatasi permasalahan yang ada. Fitur **dashboard monitoring kegiatan** dikembangkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai aktivitas PKK, kondisi keluarga, pencapaian program, serta indikator kesehatan ibu dan anak. Dashboard ini memvisualisasikan data dalam bentuk grafik dan diagram sehingga memudahkan pengambilan keputusan bagi ketua pokja maupun ketua TP PKK di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Fitur input data keluarga, dasawisma, kesehatan ibu dan anak, serta kegiatan PKK dirancang untuk menggantikan proses manual. Setiap kader dapat memasukkan data secara langsung ke dalam sistem menggunakan perangkat komputer maupun ponsel pintar. Sistem dilengkapi dengan validasi otomatis untuk mencegah data ganda atau data yang tidak lengkap. Validasi ini sangat penting mengingat pendataan dilakukan secara berjenjang dari RT/RW hingga kecamatan, sehingga data harus bebas dari kesalahan input.

Agar sistem berjalan sesuai struktur organisasi, SIM-PKK juga memiliki hak akses bertingkat. Kader dasawisma hanya dapat menginput dan melihat data wilayahnya sendiri. Kader RW dan kelurahan memiliki akses lebih luas untuk memverifikasi data, sedangkan ketua TP PKK kecamatan memiliki hak untuk melihat seluruh laporan dan mencetak dokumen dalam format PDF.

Seluruh data disimpan dalam basis data terintegrasi berbasis cloud, memungkinkan akses kapan saja dan dari mana saja. Sistem juga menyediakan fasilitas laporan otomatis berupa tabel, grafik, maupun file PDF. Laporan ini dapat diunduh untuk keperluan pelaporan rutin ke kelurahan dan kecamatan sehingga mempercepat proses administrasi dan meningkatkan akurasi data. Hasil perancangan ini menunjukkan bahwa SIM-PKK mampu menjawab kebutuhan organisasi sebagaimana teori Sistem Informasi yang menekankan integrasi data, otomatisasi proses, serta peningkatan efektivitas kerja.

4.2 Digitalisasi Penginputan Data dan Pelaporan

Implementasi digitalisasi dalam penginputan data terbukti memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas kerja kader dan mutu pelayanan TP PKK Kecamatan Cibeunying Kidul. Proses rekapitulasi data yang sebelumnya membutuhkan waktu sehari-hari karena dilakukan secara manual kini dapat diselesaikan dalam waktu jauh lebih cepat melalui sistem otomatis. Data yang telah masuk ke sistem langsung terstruktur dalam format seragam, sehingga tidak lagi ditemukan perbedaan format antar RT atau kelurahan.

Digitalisasi juga mampu mengurangi risiko kesalahan manual, seperti salah penulisan angka, ketidakkonsistenan nama keluarga, atau duplikasi pada data ibu hamil dan data anak. Validasi otomatis yang terpasang dalam sistem memastikan bahwa setiap entri data diverifikasi sebelum disimpan. Hal ini meningkatkan keandalan data sebagaimana prinsip kualitas informasi dalam teori Laudon & Laudon (2020).

Dari sisi aliran informasi, digitalisasi mempercepat proses akses data dari kelurahan ke kecamatan. Sebelum SIM-PKK diterapkan, laporan bulanan maupun tahunan baru dapat dikirim setelah kader membuat rekap manual. Kini, data dapat dipantau secara real-time oleh kelurahan maupun kecamatan tanpa menunggu rekap fisik. Kondisi ini mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan transparansi, serta memperkuat koordinasi antarlevel organisasi.

Secara keseluruhan, digitalisasi pendataan PKK telah menjadi transformasi penting yang mengubah pola kerja kader dari proses manual ke proses yang lebih modern, efisien, dan akurat. Hasil ini memperkuat teori Turban et al. (2018) bahwa digitalisasi mampu meningkatkan kecepatan layanan, akurasi data, transparansi informasi, dan efektivitas organisasi.

4.3 Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dilaksanakan sebagai bagian integral dari implementasi SIM-PKK. Pelatihan ini diberikan kepada kader dasawisma, kader RT/RW, kader kelurahan, dan kader kecamatan untuk memastikan bahwa seluruh pengguna dapat mengoperasikan sistem dengan baik. Pelatihan disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta yang beragam, mengingat beberapa kader belum terbiasa menggunakan perangkat digital.

Materi pelatihan mencakup penggunaan dasar komputer dan smartphone, termasuk cara mengakses aplikasi berbasis web, melakukan login, serta mengelola akun pengguna. Setelah itu, peserta mendapatkan pelatihan khusus mengenai cara menginput data pada SIM-PKK, seperti pengisian data keluarga, pendataan ibu hamil, pendataan balita, serta pencatatan kegiatan PKK. Selain materi teknis, kader juga diberi pelatihan media sosial untuk publikasi kegiatan sebagai bagian dari penguatan literasi digital dan transparansi kegiatan PKK kepada masyarakat.

Evaluasi pelatihan dilakukan melalui pre-test dan post-test guna mengukur peningkatan kemampuan peserta. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa terdapat peningkatan literasi digital sebesar **70%**, yang menunjukkan bahwa pelatihan berlangsung efektif dan diterima dengan baik oleh para kader. Selain itu, hasil observasi selama pelatihan dan penerapan sistem menunjukkan bahwa kader dapat mengoperasikan sistem secara mandiri, menginput data dengan benar, memperbaiki kesalahan input, serta menghasilkan laporan secara otomatis tanpa pendampingan intensif.

Keberhasilan pelatihan ini sejalan dengan konsep humanware dalam teori Sistem Informasi, yang menegaskan bahwa peningkatan kompetensi pengguna merupakan faktor utama

keberhasilan implementasi teknologi. Peningkatan literasi digital kader secara langsung berdampak pada kelancaran operasional SIM-PKK dan peningkatan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

PEMBAHASAN

5.1 SIM-PKK sebagai Inovasi Pelayanan

Pelaksanaan pendataan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan TP PKK Kelurahan oleh TP PKK Kecamatan Cibeunying Kidul menunjukkan bahwa organisasi ini bekerja melalui rangkaian aktivitas yang saling berkaitan dan terstruktur. Keterlibatan kader dasawisma, kader PKK RT/RW, kader kelurahan, dan kader kecamatan dalam mengumpulkan data warga setiap tahun menggambarkan adanya elemen manusia, prosedur, data, dan teknologi sederhana yang saling berinteraksi, sesuai dengan konsep sistem yang dikemukakan Jogiyanto (2017). Proses berjenjang dari pendataan dasawisma hingga rekapitulasi tingkat kecamatan mencerminkan karakteristik sistem berupa subsistem, input, proses, output, kontrol, dan umpan balik.

Sistematika kerja PKK tersebut memperlihatkan relevansi penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM) sebagai inovasi pelayanan publik. Pendekatan manual selama ini menimbulkan keterlambatan, kesalahan pencatatan, dan minimnya konsistensi data. O'Brien & Marakas (2017) menegaskan bahwa Sistem Informasi adalah kombinasi manusia, perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, dan basis data yang bekerja bersama menyediakan informasi yang berguna. Dengan merancang SIM-PKK, seluruh alur pendataan dapat diintegrasikan sehingga menghasilkan informasi yang cepat, tepat, akurat, serta mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan yang dilakukan pimpinan PKK (McLeod & Schell, 2012). Dengan demikian, SIM-PKK berfungsi sebagai bentuk inovasi pelayanan yang meningkatkan akurasi, konsistensi, transparansi, serta efisiensi proses kerja kader.

5.2 Digitalisasi Sebagai Upaya Transformasi

Transformasi pendataan PKK dari manual ke digital merupakan langkah strategis untuk meningkatkan mutu pelayanan. Digitalisasi memungkinkan data diproses lebih cepat, lebih akurat, dan lebih mudah ditelusuri. Hal ini selaras dengan pandangan Laudon & Laudon (2020) bahwa data akan bernilai apabila diolah menjadi informasi yang bermakna bagi pengguna. Melalui SIM-PKK, data mentah seperti jumlah ibu hamil, kelahiran, kematian bayi, serta kegiatan warga dapat diolah menjadi informasi penting bagi kelurahan dan kecamatan dalam merencanakan program, memantau perkembangan keluarga, serta melakukan evaluasi.

Penerapan SIM-PKK juga sejalan dengan teori Turban, Pollard & Wood (2018) yang menyebutkan bahwa digitalisasi meningkatkan efisiensi operasional organisasi, mempercepat layanan, mengurangi kesalahan data, serta meningkatkan transparansi informasi. Digitalisasi pendataan PKK terbukti meningkatkan kecepatan pelayanan (responsiveness), keandalan rekapitulasi data (reliability), kemudahan akses (tangibles dan assurance), serta meningkatkan empati dalam pelayanan karena kader dapat fokus pada interaksi dengan masyarakat tanpa terbebani proses administratif yang berat. Dengan demikian, digitalisasi PKK bukan hanya mengganti format manual menjadi digital, tetapi merupakan proses transformasi pelayanan yang memperbaiki alur kerja, mengurangi beban kader, dan meningkatkan kualitas layanan publik secara menyeluruh.

5.3 Pelatihan TIK Meningkatkan Mutu Kerja Kader

Keberhasilan implementasi SIM-PKK tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia sebagai pengguna sistem. Konsep **humanware** dalam sistem informasi menekankan bahwa kompetensi, kesiapan, dan pemahaman pengguna merupakan faktor utama yang menentukan efektivitas sistem. Oleh karena itu, pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2025 yang meliputi sosialisasi, pembangunan sistem, pengenalan sistem, pendampingan teknologi, evaluasi, dan keberlanjutan program merupakan langkah penting untuk meningkatkan kemampuan kader.

Pelatihan TIK yang diberikan kepada kader dasawisma, kader RT/RW, kader kelurahan, dan kader kecamatan memastikan bahwa mereka mampu mengoperasikan SIM secara efektif dan mandiri. Pressman & Maxim (2015) menegaskan bahwa setiap sistem yang dikembangkan harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna (user requirement) dan dilengkapi fase pelatihan untuk menjamin implementasi yang optimal. Pelatihan ini mendukung peningkatan mutu kerja kader, memperkuat akurasi pendataan, serta mendorong kader memberikan pelayanan yang lebih responsif dan profesional.

SIMPULAN

1. TP PKK Kecamatan Cibeunying Kidul membutuhkan SIM-PKK yang terintegrasi untuk mengatasi kendala pendataan dan pelaporan.
2. Digitalisasi penginputan data dan pelaporan meningkatkan kecepatan, akurasi, serta efektivitas pelayanan.
3. Pelatihan TIK berperan penting dalam meningkatkan kemampuan kader dalam mengoperasikan SIM-PKK.
4. Implementasi SIM-PKK terbukti mampu meningkatkan mutu pelayanan administrasi PKK secara signifikan.

REKOMENDASI

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Mengembangkan sistem dengan fitur mobile, analitik, dan integrasi big data.

2. Bagi Kader PKK

- a. Secara rutin mengikuti pelatihan TIK.
- b. Menggunakan SIM-PKK sebagai media utama pendataan.

3. Bagi Pemerintah Kecamatan

- a. Menyediakan dukungan anggaran dan infrastruktur digital.
- b. Membuat kebijakan wajib pakai SIM-PKK di semua kelurahan

DAFTAR PUSTAKA

- Jogiyanto, H. M. (2017). *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Andi.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (16th ed.).
- Pearson. McLeod, R., & Schell, G. (2012). *Management Information Systems* (10th ed.).
- Pearson. O'Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2017). *Management Information Systems* (10th ed.). McGraw-Hill.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. *Journal of Retailing*, 64(1), 12–40.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2015). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (8th ed.). McGraw-Hill.
- Tjiptono, F., & Chandra, G. (2016). *Service, Quality, and Satisfaction*. Yogyakarta: Andi.
- Turban, E., Pollard, C., & Wood, G. (2018). *Information Technology for Management*. Wiley.
- Zeithaml, V. A., Bitner, M. J., & Gremler, D. D. (2018). *Services Marketing: Integrating Customer Focus Across the Firm*. McGraw-Hill.

